

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Dalam sistem ekonomi Indonesia koperasi sebagai elemen yang telah lama menjadi alat untuk memajukan demokrasi ekonomi, menghadapi tantangan yang signifikan ketika tidak ada upaya inovasi dan pengembangan kreativitas yang diterapkan. Dalam upaya untuk meningkatkan perkembangan koperasi, banyak hambatan yang pada akhirnya menjadi faktor-faktor penghambat pertumbuhan koperasi.

Pemerintah Republik Indonesia secara jelas telah menegaskan bahwa dalam upaya memajukan pembangunan nasional, koperasi harus berperan sebagai landasan utama dalam mendukung ekonomi masyarakat. Kebijakan ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan semangat yang terdapat pada UUD No. 1945 Pasal 33 Ayat 1, menjelaskan bahwasanya Perekonomian dirancang selaku usaha bersama mengacu kepada asas kekeluargaan.” (Nendissa, 2023). Di samping disebutkan dalam UUD 1945, koperasi juga tunduk pada regulasi yang khusus mengatur operasinya, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 berkaitan dengan Perkoperasian yang telah direvisi menjadi UU No. 17 Tahun 2012 terkait dengan Perkoperasian (JDIH BPK, 2012). Transformasi ekonomi yang semakin cepat disertai perkembangan teknologi dan persaingan global yang ketat, telah mendorong seluruh sektor ekonomi termasuk koperasi

untuk terus meningkatkan kinerjanya. Kinerja pengelolaan pada koperasi merupakan indikator kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan keberlanjutan operasionalnya. Evaluasi ini mencakup pencapaian tujuan koperasi, efisiensi operasional, keuangan, manajemen risiko, pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya manusia, dan kepuasan anggota. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin pengelolaan sumber daya yang efisien, pertumbuhan finansial yang berkelanjutan, dan pelayanan yang memuaskan bagi anggota. Selain itu, kinerja pengelolaan juga mencakup tata kelola koperasi. Dengan meningkatkan kinerja ini, koperasi dapat menjaga keberlanjutan, memberikan dampak positif pada masyarakat, dan memenuhi prinsip-prinsip koperasi secara efektif.

Pada organisasi koperasi berlaku *agency theory* yang merupakan suatu pendekatan yang mempelajari hubungan dan konflik keagenan atau kepentingan antara agen dan pemilik (prinsipal) yang melaksanakan tugas tertentu (Pradnyaswari & Putri, 2016). Dalam hal ini teori keagenan diperlukan karena tata kelola koperasi diberikan kepada agen (pengurus) sementara anggota sebagai pengguna jasa sekaligus pemilik (prinsipal). Fokus utama pihak prinsipal harusnya memastikan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, agar koperasi dapat menjalankan fungsi dan peran pentingnya bagi perekonomian, peningkatan kinerja pengelolaan koperasi harus dilakukan secara berkelanjutan.

Konflik keagenan rentan muncul dalam koperasi, ketika orang-orang dalam posisi yang berbeda (dimana anggota sebagai prinsipal sedangkan pihak pengurus sebagai agen) menempatkan kepentingan pribadi di atas tujuan bersama perusahaan (Handayani dkk., 2020). Untuk memitigasi kemungkinan konflik antara agen dan prinsipal, perlu dibangun tata kelola yang baik, yang diharapkan dapat

mempersempit kesenjangan di antara keduanya. Tata kelola yang dapat diterapkan adalah Good Corporate Governance.

World Bank memberikan definisi dari Good Corporate Governance, yaitu peraturan untuk perusahaan yang mengatur perilaku manajemen perusahaan dengan merinci tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemegang keputusan (Supianti, 2022). Kerangka GCG mencakup lima prinsip dasar: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (Njatrijani dkk., 2019). Implementasi GCG memiliki maksud menciptakan budaya dan meningkatkan kesadaran seluruh pihak yang terlibat dalam koperasi, agar berfokus pada tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Manajemen pada koperasi harus menempatkan kesejahteraan anggota sebagai prioritas utama, mengakui peran krusialnya dalam perekonomian, dan memastikan pengelolaan yang efektif guna meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan data mengenai jumlah koperasi yang aktif di setiap provinsi di Indonesia, Provinsi Bali menempati posisi kedelapan dengan jumlah koperasi terbanyak.

Tabel 1. 1
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit)		
	2019	2020	2021
Aceh	4.115	4.176	4.102
Sumatera Utara	4.199	4.593	5.033
Sumatera Barat	1.919	2.047	2.200
Riau	2.946	3.150	3.248
Jambi	2.540	2.190	2.046
Sumatera Selatan	3.888	4.102	3.992
Bengkulu	1.883	1.948	1.983
Lampung	2.075	2.088	2.282
Kep. Bangka Belitung	651	676	711

Provinsi	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit)		
	2019	2020	2021
Kep. Riau	884	929	982
Dki Jakarta	3.447	4.150	4.542
Jawa Barat	13.247	14.706	15.621
Jawa Tengah	13.164	12.190	10.270
Di Yogyakarta	1.751	1.820	1.853
Jawa Timur	21.757	22.464	22.845
Banten	3.881	4.047	4.216
Bali	4.244	4.193	4.193
Nusa Tenggara Barat	2.396	2.479	2.622
Nusa Tenggara Timur	2.697	2.808	2.874
Kalimantan Barat	2.935	2.904	3.142
Kalimantan Tengah	2.510	2.633	2.921
Kalimantan Selatan	1.721	1.824	1.875
Kalimantan Timur	2.906	3.036	3.067
Kalimantan Utara	476	558	612
Sulawesi Utara	3.620	3.722	3.668
Sulawesi Tengah	1.429	1.405	1.435
Sulawesi Selatan	4.966	5.057	4.535
Sulawesi Tenggara	3.051	3.009	2.413
Gorontalo	884	928	975
Sulawesi Barat	837	909	862
Maluku	2.373	2.430	2.488
Maluku Utara	917	997	1.081
Papua Barat	608	663	723
Papua	2.131	2.293	2.434

(Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Data Dikutip Dari Publikasi Statistik Indonesia)

Dari Sembilan kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana adalah daerah yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Bali. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana menyebutkan bahwa koperasi yang ada pada November 2023 tercatat berjumlah 282 koperasi. Dari total koperasi yang tercatat, terdapat 39 koperasi yang berjenis Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

KSP merupakan koperasi yang beroperasi aktif didalam menghimpun dana melalui tabungan secara rutin dari anggotanya sendiri. Dana atau modal tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman dengan proses yang mudah, biaya yang terjangkau, serta dalam waktu singkat, untuk mendukung kegiatan dan kesejahteraan anggota (Ayati, 2019). KSP didirikan untuk menghadirkan peluang bagi para anggotanya supaya bisa mendapatkan pinjaman secara mudah dan tingkat bunga yang rendah.

Sebagai lembaga keuangan, KSP memiliki karakteristik, struktur, dan sistemnya tersendiri, yang wajib diawasi, diatur, dan dievaluasi kinerjanya. Disamping itu, karakteristik KSP yang berbeda dengan entitas bisnis lainnya mengakibatkan risiko manajemen yang lebih tinggi bagi jenis usahanya, sehingga tata kelola yang mendukung menjadi kebutuhan esensial untuk menjamin kepercayaan pihak lain dalam menggunakan layanan yang ditawarkan oleh KSP.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bagian Koperasi Kabupaten Jembrana yaitu Ibu Yuni, beliau menyatakan KSP yang ada di Jembrana tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan cenderung stagnan. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan seperti gagal bayar dari anggota yang mengakibatkan modal tidak berputar, kasus korupsi atau *fraud*, serta masalah pengelolaan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka dalam melaporkan keuangan dan menyelenggarakan RAT.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) diselenggarakan sebagai hasil dari kinerja baik koperasi, yang menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua kegiatan usaha kepada anggotanya. Dalam RAT juga akan dibahas perencanaan belanja dan anggaran pendapatan koperasi untuk tahun buku

mendatang (Mulyaningtyas dkk., 2021). Peraturan Menteri No. 19 Pasal 4 (2) menyatakan bahwa koperasi memiliki kewajiban untuk mengadakan Rapat Anggota setidaknya satu kali dalam setahun buku. Berikut data keragaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Jembrana.

Tabel 1. 2
Perkembangan Keragaan Koperasi di Kabupaten Jembrana
Data Posisi Per: November 2023

Nama Koperasi	Kec.	Kop (Unit)		Jml	RAT
		Aktif	T. Ak	Kop	
KSP Bali Amertha	Negara	1		1	
KSP Citra Dana Mandiri	Negara	1		1	1
KSP Sumber Usaha	Negara	1		1	
Kopdit Bali Arta Mandiri	Negara	1		1	
KSP Buka Harapan	Negara	1		1	1
KSP Cipta Mandiri	Negara	1		1	1
KSP Bali Putra Mandiri	Negara	1		1	
KSP Sedana Yoga Amertha	Negara	1		1	
KSP Putra Tarukan Mandiri	Negara	1		1	
KSP Dana Mitra Rahayu	Negara	1		1	1
KSP Artha Anugerah Blambangan	Negara	1		1	1
KSP Eka Bali Mandiri	Negara	1		1	1
KSP Graha Wahyu Mertha	Jembrana	1		1	1
KSP Panca Karya	Jembrana	1		1	1
KSP Sari Anugrah	Jembrana		1	1	
KSP Bali Anugerah Sejahtera	Jembrana		1	1	
KSP Bintang Mandiri	Jembrana	1		1	
KSP Sari Sudana	Jembrana	1		1	1
KSP Bankit Indonesia Mandiri	Jembrana	1		1	
KSP Pari Arta Sejahtera	Jembrana	1		1	
KSP Arta Mas Mandiri	Mendoyo		1	1	
KSP Sentana Werdi	Mendoyo	1		1	1
KSP Mekar Sari Artha	Mendoyo	1		1	1
KSP Nira Sari Mertha	Mendoyo		1	1	
KSP Amertha Satya Nugraha	Mendoyo	1		1	1
KSP Satria Gana	Mendoyo	1		1	1
KSP Lumbung Sari Mandiri	Mendoyo		1	1	
KSP Swadana Guna Jaya	Mendoyo	1		1	1
KSP Artha Sedana Bakthi	Mendoyo	1		1	1
KSP Buana Arta Mandiri	Melaya		1	1	

Nama Koperasi	Kec.	Kop (Unit)		Jml	RAT
		Aktif	T. Ak	Kop	
KSP Berumbun Utama	Melaya	1		1	
KSP Kasih Abadi	Melaya	1		1	1
KSP Mertha Lestari	Pekutatan	1		1	1
KSP Surya Cipta Mandri	Pekutatan	1		1	
KSP Kari Sejahtera	Pekutatan		1	1	
KSP Wibuh Artha	Pekutatan	1		1	1
KSP Wahana Bakti Mandiri	Pekutatan	1		1	1
KSP Bangun Jaya Dewata Sukses	Pekutatan	1		1	
KSP Sinar Bali Mandiri	Pekutatan	1		1	1
Jumlah Per November 2023		32	7	39	20

(Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana, 2023)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) saat ini menghadapi tantangan aktual karena adanya penurunan kinerja akibat pergeseran pandangan masyarakat yang sebelumnya fokus pada kekeluargaan menjadi lebih individual sehingga menghambat kemajuan dan perkembangannya sebagai badan usaha. Dari informasi Tabel. 2, tujuh dari jumlah KSP yang telah terdaftar dinyatakan tidak beroperasi dengan aktif. Dari total KSP yang dinyatakan aktif, terdapat dua belas KSP yang tidak mengadakan RAT pada tahun 2023.

Beberapa kendala yang menjadi kekurangan KSP, di antaranya yaitu tata kelola koperasi tidak baik, rendahnya tingkat daya saing, kurangnya kesadaran anggota terkait kerja sama koperasi, serta kekurangan SDM yang berpengalaman didalam mengelola koperasi. Seperti pada bulan Juli tahun 2020, telah terjadi permasalahan di KSP yaitu Sedana Yoga, Kabupaten Jembrana yang diakibatkan oleh pengurus KSP itu sendiri. Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam berita, terdakwa diperkirakan terlibat dalam praktik penipuan serta penggelapan sertifikat tanah sejumlah 185 Juta, dengan dugaan bertujuan untuk keuntungan pribadi (NusaBali, 2020).

Oleh karena itu, KSP perlu menciptakan keunggulan supaya bisa bersaing bersama entitas bisnis lainnya. Kelebihan dalam bersaing bisa terwujud jika KSP selain mengikuti tata kelola konvensional, namun juga menjalankan tata kelola perusahaan yang lebih profesional. Untuk mewujudkan penerapan tata kelola yang lebih profesional serta penerapan yang efektif, GCG menjadi isu penting.

Fenomena tersebut menjadi alasan peneliti untuk mengetahui bagaimana GCG mempengaruhi kinerja pengelolaan koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berada di Kabupaten Jember.

Menurut temuan Astuti dkk. (2023) menjelaskan *transparency* dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif untuk kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Utara. Sedangkan *responsibility*, independensi, dan kewajaran tidak memiliki pengaruh bagi kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Utara. Adapun temuan Putri & Erlinawati (2023) membuktikan kinerja koperasi di Kecamatan Tegalalang terpengaruh atas faktor-faktor *transparency*, *responsibility*, *accountability*, serta *independency*. Namun, faktor dari kewajaran tidak ada pengaruh yang signifikan untuk kinerja koperasi.

Tidak selaras dengan temuan Wahyuni dkk. (2021) membuktikan prinsip *accountability*, *transparency*, dan *independency* tidak menyumbang dampak untuk kinerja LPD di Kecamatan Kuta Selatan. Melainkan, prinsip *responsibility* (tanggung jawab) dan *fairness* mempunyai dampak yang positif untuk kinerja LPD di Kecamatan Kuta Selatan.

Kemudian penelitian yang disusun oleh Nirmala dkk. (2022) membuktikan GCG dengan serentak menyumbang pengaruhnya dengan signifikan untuk kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Transparansi, *responsibility*, *accountability*, *fairness*,

dan *independency* menyumbang dampak positive dan signifikan untuk kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar.

Studi inipun merujuk kepada temuan Marlina (2019) dimana dapat ditemukan beberapa perbedaan dengan kajian studi terdahulu yakni terletak pada subjek penelitian yaitu menggunakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ada di Kabupaten Jembrana. Alasan pemilihan Kabupaten Jembrana sebagai lokasi penelitian adalah karena kondisi KSP di Kabupaten Jembrana yang tercatat di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan menghadapi banyak hambatan dan tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Dari jumlah KSP yang ada, ditemukan sebanyak 7 KSP dinyatakan sudah tidak aktif beroperasi. Penyebab dari permasalahan tersebut karena tata kelola yang tidak baik seperti ketidakmampuan melaporkan kegiatannya pada Rapat Anggota Tahunan, modal tidak berputar, dan adanya *fraud*. Oleh karena itu penelitian ini masih sangat relevan untuk diteliti.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah disebutkan, demikian penulis merasa terdorong menyusun kajian studi melalui pengambilan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana”**. Studi inipun berupaya mengujikan adanya pengaruh *GCG* dinilai berdasarkan prinsip transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, kemandirian, serta kesetaraan terhadap kinerja pengelolaan KSP di Kabupaten Jembrana, Bali.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, sehingga bisa dibuat identifikasi dari permasalahan pada kajian studi ini, yakni:

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Jembrana mengalami permasalahan di antaranya modal tidak berputar, ketidakmampuan dalam melaporkan keuangan dan menyelenggarakan RAT, serta kasus korupsi atau *fraud*.
2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Jembrana tidak mengalami perkembangan secara signifikan dan cenderung stagnan.
3. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Jembrana memerlukan perbaikan tata kelola untuk meningkatkan kinerja pengelolaan, pengendalian internal, serta mengurangi ketidaksempurnaan tata kelola sebelumnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi kajian masalah penelitian agar penelitian ini dapat berfokus dan tidak keluar dari inti permasalahan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, peneliti memberikan batasan masalah yaitu kajian studi ini berfokus kepada KSP yang telah terdaftar di Kabupaten Jembrana. Studi inipun hanya sebatas menguji pengaruh 5 asas dari GCG yaitu *transparency*, *responsibility*, *accountability*, kemandirian, dan kesetaraan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasar pada batasan permasalahan yang sudah dikemukakan, demikian bisa dirumuskan masalah yang diperoleh:

1. Bagaimana pengaruh transparansi bagi kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana?

2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas bagi kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana?
3. Bagaimana pengaruh responsibilitas bagi kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana?
4. Bagaimana pengaruh kemandirian bagi kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana?
5. Bagaimana pengaruh kesetaraan bagi kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan permasalahan yang ditetapkan, demikian bisa ditetapkan tujuan pelaksanaan studi ini yakni untuk mengetahui pengaruh:

1. Transparansi bagi kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana.
2. Akuntabilitas bagi kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana.
3. Responsibilitas bagi kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana.
4. Kemandirian bagi kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana.
5. Kesetaraan bagi kinerja pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan kajian studi yang telah kemukakan, diharapkan agar studi ini mampu memberikan kegunaan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Dengan teoritis, diharapkan kajian studi ini mampu menjadi referensi dalam pembangunan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi mengenai penerapan GCG terhadap kinerja pengelolaan KSP. Selain itu diharapkan temuan dari penelitian ini bisa digunakan untuk bahan pemikiran literatur terkait *Good Corporate Governance* serta sebagai materi pembanding untuk penelitian-penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penulis diharap mampu memberikan manfaat untuk peneliti dalam memperoleh pengetahuan lebih komprehensif mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja pengelolaan KSP.

b. Bagi Koperasi Simpan Pinjam

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi secara relevan dalam mendorong implementasi GCG di lingkungan KSP di Kabupaten Jembrana.

c. Bagi Akademisi

Temuan kajian studi ini diharap mampu menjadi tambahan literatur dan referensi untuk mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai isu yang serupa, yakni dampak GCG terhadap kinerja pengelolaan KSP.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Studi ini diharap bisa dijadikan tambahan referensi dan berkontribusi pada kekayaan perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha.

